

BAB II

MASYARAKAT PERBATASAN DI PULAU SEBATIK

Bab II skripsi ini menjelaskan tentang gambaran umum wilayah perbatasan yang diteliti dan sejarah terbentuknya masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia, Pulau Sebatik. Pada bab ini juga dijelaskan problem permasalahan pendidikan yang ada di perbatasan di Pulau Sebatik.

A. Gambaran Umum Masyarakat di Pulau Sebatik

1. Administrasi Pulau Sebatik

Secara administratif Pulau Sebatik merupakan wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Pulau Sebatik dahulunya merupakan kecamatan yang menjadi bagian dari Kabupaten Nunukan setelah terbentuknya Kabupaten Nunukan sebagai daerah otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Untuk mengoptimalkan Wilayah Sebatik pemerintah juga melakukan pemekaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No.03 tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Sebatik Barat, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan No.25 Tahun 2011 tentang pembentukan Kecamatan Sebatik Timur, Sebatik Utara, dan Sebatik Tengah. Hingga sekarang terdapat 5 kecamatan di Pulau Sebatik yaitu Kecamatan Sebatik dengan ibukota kecamatan berada di desa Tanjung Karang, Sebatik Barat dengan ibukota kota kecamatan di Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Timur dengan

ibukota kecamatan di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Utara dengan ibukota kecamatan di Desa Sungai Pancang, dan Sebatik tengah dengan ibu kota kecamatan di Desa Aji Kuning (Basundoro, P. (2013). Pulau Sebatik Sebagai Pintu Kecil).

2. Letak Geografis dan Demografi Pulau Sebatik

Gambar 2.1 Lokasi Peta Pulau Sebatik



Sumber: Google Image

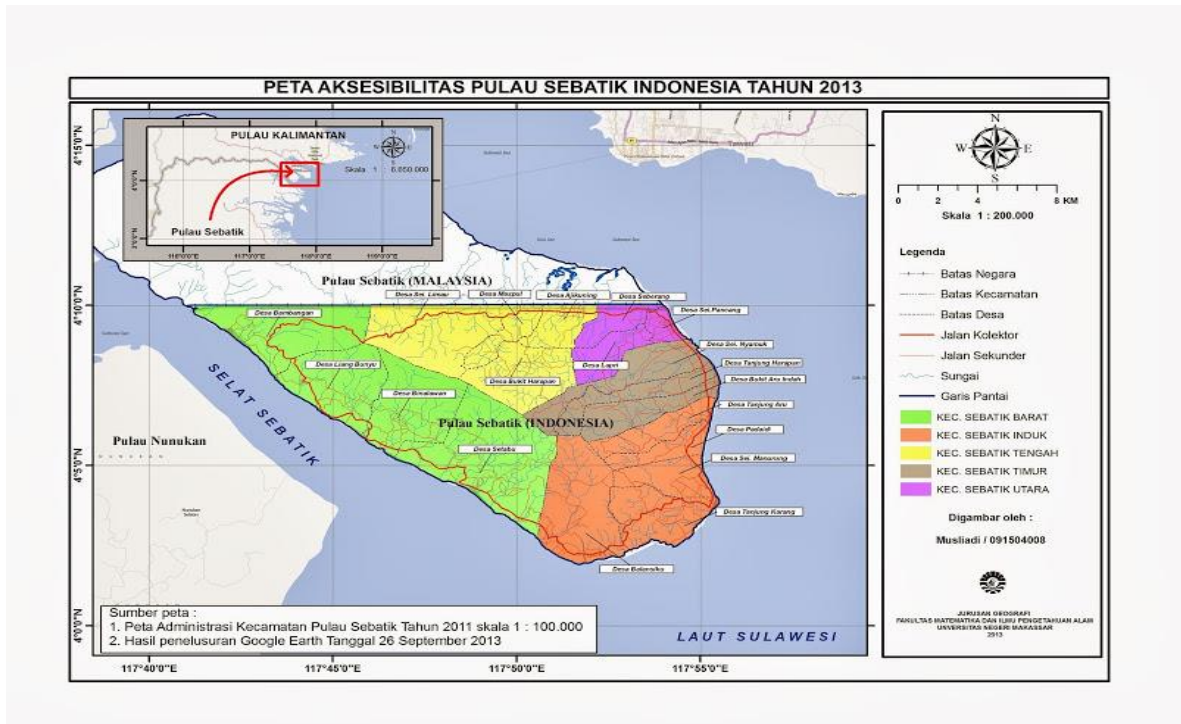
Secara geografis Pulau Sebatik terletak di bagian paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara. Titik koordinat Pulau Sebatik terletak antara 117°41'05'' – 117°55'56'' Bujur Timur, dan 4°01'37'' - 4°10'05'' Lintang Utara. Di wilayah utara Pulau Sebatik berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur (Sabah). Di sebelah barat berbatasan langsung dengan selat Nunukan. Di sebelah timur dan selatan berbatasan langsung dengan selat Makassar (laut Sulawesi). Luas wilayah Pulau Sebatik seluas 24,6 ribu Ha atau sebanding dengan 1,72% dari luas wilayah

kabupaten Nunukan. Jumlah penduduk Pulau Sebatik menurut sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2012 adalah sebanyak 33.500 jiwa (Basundoro, P. (2013). Pulau Sebatik Sebagai Pintu Kecil).

Suku dengan jumlah terbesar yang mendiami Pulau Sebatik terdiri dari, Suku Tidung, Suku Bugis, Suku Flores, dan Suku Jawa. Penyebaran penduduk di Pulau Sebatik hampir merata di seluruh wilayah Pulau Sebatik. wilayah dengan kependudukan terpadat di Pulau Sebatik terletak di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sebatik Utara, Sebatik Timur, dan Sebatik Tengah. Pendapatan penduduk Pulau Sebatik umumnya melalui sektor perdagangan, perikanan, dan juga perkebunan. Komoditas utama yang diperdagangkan ke wilayah Tawau atau sekitar wilayah Sebatik adalah Sawit, Kakau, Pisang, dan ikan (Basundoro, P. (2013). Pulau Sebatik Sebagai Pintu Kecil).

3. Aksesibilitas dan Sarana Pulau Sebatik

Gambar 2.2 Peta Aksesibilitas Pulau Sebatik Indonesia tahun 2013



Sumber: Google Image

Pulau Sebatik hanya dapat diakses menggunakan modal transportasi laut dan udara. Untuk mengakses Pulau Sebatik menggunakan jalur udara, penerbangan yang ditempuh melalui jalur penerbangan melalui Bandara Sepinggan, Balikpapan. Dari Balikpapan bisa melanjutkan penerbangan menuju Bandara Juwata Tarakan dengan menghabiskan waktu sekitar 1,5 jam. Untuk menuju Pulau Nunukan Dari Bandara Juwata Tarakan perjalanan dapat dilanjutkan dengan pesawat kecil selama 30 menit.

Perjalanan dari kota Tarakan ke Pulau Sebatik dapat ditempuh juga melalui jalur laut dengan menggunakan speed boat selama 3 jam. Apabila menggunakan kapal perintis perjalanan hanya bisa dilakukan ke Pulau Nunukan dan tidak bisa langsung menuju Pulau Sebatik. dari Pulau Nunukan baru melanjutkan perjalanan ke Pulau Sebatik menghabiskan waktu sekitar 15-30 Menit menggunakan perahu kecil. Untuk mengakses pusat kota di Pulau Sebatik jika melewati jalur Pulau Nunukan-Sebatik akan menghabiskan waktu perjalanan darat selama 2-3 jam karena kondisi jalan yang tidak memadai. Jika melalui jalur Tarakan-Sebatik maka akan langsung tiba di Pusat kota dengan waktu 10-15 Menit.

Untuk fasilitas jalan sendiri, hampir keseluruhan jalan raya di Pulau Sebatik sudah diaspal. Hanya tinggal di wilayah Sebatik Barat yang belum tersentuh akses jalan yang memadai hingga tahun 2015. Fasilitas listrik tersedia hampir merata di Seluruh wilayah Sebatik. namun untuk wilayah Sebatik tengah hingga ke Sebatik Barat sampai pertengahan tahun 2016 masih dalam proses instalasi dan pemasangan. Selama ini pasokan untuk kebutuhan listrik di Pulau Sebatik dipenuhi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang disuplai dari Pulau Nunukan untuk wilayah Sebatik Selatan. Untuk wilayah Sebatik Utara dipenuhi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Hidro (PLTMH).

Untuk fasilitas kesehatan terdapat puskesmas hampir di setiap Kecamatan di Pulau Sebatik dan terdapat satu Puskesmas Pusat di Wilayah Sungai Nyamuk yang menjadi pusat kesehatan terbesar di Pulau Sebatik walaupun fasilitas di Puskesmas

tersebut kurang memadai. Fasilitas umum seperti Sekolah, Pasar, Pertokoan, Warung Makan, Hotel, Wartel, Bank, ATM, Masjid, dan Money Changing sudah tersedia di Pulau Sebatik. Namun fasilitas yang menunjang arus keluar masuk manusia, barang, dan jasa dari wilayah Tawau Malaysia belum memadai di Pulau Sebatik. Hal ini terlihat dengan tidak adanya fasilitas seperti Biro Perdagangan Luar Negeri, Bea Cukai, atau Imigrasi. Tentu hal tersebut menjadi Paradoks bagi masyarakat di Perbatasan yang mana mereka selalu melakukan aktivitas dan interaksi dengan masyarakat di Tawau hampir dalam segala bidang (Basundoro, P. (2013). Pulau Sebatik Sebagai Pintu Kecil).

4. Profil Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Nunukan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.493 km² dan berpenduduk sebanyak 140.842 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Motto Kabupaten Nunukan adalah "Penekindidebaya" yang artinya "Membangun Daerah" yang berasal dari bahasa Tidung. Nunukan juga adalah nama sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas).

Pada tahun 2003 terjadi tragedi kemanusiaan besar-besaran di Nunukan ketika para pekerja gelap asal Indonesia yang bekerja di Malaysia dideportasi kembali ke

Indonesia lewat Nunukan. Pelabuhan Nunukan merupakan pelabuhan lintas dengan kota Tawau, Malaysia. Bagi penduduk kota Nunukan yang hendak pergi ke Tawau diperlukan dokumen PLB (Pas Lintas Batas). Setiap hari rata-rata sekitar 8 unit kapal cepat dengan kapasitas kurang lebih 100 orang mondar-mandir antar Nunukan dengan Tawau, Malaysia. Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan, yang terbentuk berdasarkan pertimbangan luas wilayah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran Kabupaten bulungan ini di pelopori oleh R.A. Besing yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Bulungan.

Pada tahun 1999, pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah dengan didasari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dasar inilah dilakukan pemekaran pada Kabupaten Bulungan menjadi 2 kabupaten baru lainnya, yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau. Pemekaran Kabupaten ini secara hukum diatur dalam UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang pada tanggal 4 Oktober 1999.

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pembentukan kabupaten ini berdasarkan pertimbangan luas wilayah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran Kabupaten Bulungan di pelopori oleh R.A. Besing yang pada

saat itu menjabat sebagai bupati. Pada tahun 1999, pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah dengan didasari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dasar inilah dilakukan pemekaran pada Kabupaten Bulungan menjadi 2 kabupaten baru lainnya, yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas).

Pemekaran Kabupaten ini secara hukum diatur dalam UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang pada tanggal 4 Oktober 1999. Dengan dasar UU Nomor 47 tahun 1999 tersebut Nunukan resmi menjadi kabupaten dengan 5 wilayah administratif, yakni:

- a. Kecamatan Lumbis
- b. Kecamatan Sembakung
- c. Kecamatan Nunukan
- d. Kecamatan Sebatik
- e. Kecamatan Krayan

Sejak tahun 2012, kabupaten ini merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, seiring dengan pemekaran provinsi baru tersebut dari Provinsi Kalimantan Timur.

B. Sejarah Masyarakat Perbatasan Pulau Sebatik

Perbatasan sebuah negara tercipta dengan munculnya negara itu sendiri. Kemunculan negara tersebut mengakibatkan penduduk yang semula memiliki etnis yang sama dan tinggal dengan harmonis harus dipisahkan karena batas negara dan status kewarganegaraan. Menurut D.Whitterley, (Whottersley, 1982 : 101-102) Boundary merupakan batas wilayah negara atau perbatasan dimana secara demarkasi letak negara dalam rotasi dunia yang telah ditentukan, dan mengikat secara bersama sama atas rakyatnya dibawah suatu hukum dan pemerintah yang berdaulat.

Pulau Sebatik merupakan wilayah Boundary yang muncul setelah disepakatinya batas demarkasi oleh pemerintahan kolonial Hindia-Belanda dan Britania Raya dalam traktat *Grenzen Borneo* pada tahun 1891. Masalah baru muncul ketika ditarik garis batas 4°10' Lintang Selatan di Pulau Sebatik yang terntara membagi Pulau Sebatik menjadi dua. Sebagai akibatnya dibagian utara Pulau Sebatik menjadi daerah kekuasaan Inggris dan dibagian selatan menjadi daerah kekuasaan Belanda. Namun tidak ada garis batas yang jelas dalam upaya membagi kedua pulau ini, hal ini semakin diperparah dengan kebiasaan masyarakat setempat yang menjalani pola hidup nomaden dan berpindah-pindah diantara kedua batas kepemilikan pulau.

Maka dari itu pada tahun 1916 dalam traktat kedua diangkat lagi persoalan tentang garis perbatasan di Pulau Sebatik. Akhirnya dilakukanlah

penyelidikan di lapangan dan Traktat inilah yang menjadi awal mulai terbentuknya Boundary Line yang memisahkan Pulau Sebatik menjadi kepemilikan oleh dua negara pasca Indonesia merdeka. Wilayah yang menjadi hak negara Indonesia berdasarkan wilayah yang dipengaruhi kekuasaan Hindia Belanda yaitu sebelah selatan Pulau Sebatik. Sementara wilayah yang menjadi hak negara Malaysia terletak di bagian utara Pulau Sebatik. Boundary Line ini kemudian ditandai dengan 18 patok perbatasan yang terdiri dari 1 patok timur, dan satu patok barat, serta 16 patok tipe C yang terbentang sepanjang 25 Km di Pulau Sebatik berdasarkan garis imajiner pada titik $4^{\circ}10'$ (Irfan, M. (Sutradara). (2016). Sebatik : Indonesia).

Terbentuknya Boundary di Pulau Sebatik diikuti pula dengan terbentuknya Frontier dari Negara Indonesia di wilayah Kalimantan Utara. Frontier adalah daerah perbatasan dalam suatu negara yang mempunyai ruang gerak terbatas, tetapi karena lokasinya berdekatan dengan negara lain, mengakibatkan pengaruh luar dapat masuk ke negara tersebut.

Masyarakat Frontier di Pulau Sebatik telah ada sejak awal abad ke 20. Pada awalnya Pulau Sebatik merupakan sebuah wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan sendiri merupakan kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan Sekarang. Kesultanan Bulungan ini telah berdiri sejak tahun 1731, dengan raja pertama Kesultanan Bulungan bernama

Wira Amir bergelar Amirul Mukminin (1731-1777). Raja dari Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras bergelar Sultan Maulana Muhammad Djamaluddin (1931-1958). Sultan Maulana Muhammad Djamaluddin ini menjadi sultan terakhir Kesultanan Bulungan atau menjadi Sultan ke 13 dalam sejarah Kesultanan Bulungan (Kartikasari, W. (2012). Mempelajari Wilayah Perbatasan Sebagai Ruang Bersama.).

Sekitar tahun 1900 masyarakat yang berada di sekitar Pulau Sebatik meminta Sultan Bulungan agar membuka wilayah sebatik untuk dihuni oleh penduduk sekitarnya. Permintaan tersebut disetujui oleh Sultan Bulungan dengan syarat, pertama masyarakat yang ingin mendiami pulau tersebut harus mampu merawat orang yang meninggal dunia. Syarat yang kedua bagi masyarakat jika hendak mendiami wilayah sebatik adalah harus mampu membantu dan merawat orang yang melahirkan.

Akhirnya persyaratan tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang kemudian menjadi masyarakat pertama di Pulau Sebatik tersebut. Setabu menjadi kampung yang pertama kali berdiri dan ditinggali warga pada tahun 1913. Pemimpin kampung yang pertama di kampung Setabu adalah Sulaeman. Sulaeman inilah yang kemudian mendirikan kampung lain di Sebatik dan menjadi pembekal atau kepala kampung.

Pada awalnya, kampung Setabu dihuni sekitar 30 keluarga yang hidup dengan cara bercocok tanam. Luas wilayah kampung Setabu saat itu hampir meliputi seluruh luas wilayah Pulau Sebatik. Diprediksi luas wilayah Kampung Setabu saat itu terdiri dari Setabu, Mantikas, Liang Bunyu, dan Bambang. Populasi penduduk yang sedikit, membuat jarak antara satu rumah penduduk dengan rumah penduduk yang lain berjarak cukup jauh.

Masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1965-1967 menjadi awal masuknya orang-orang dari Suku Bugis ke Pulau Sebatik. Walaupun pada masa awal pembukaan lahan oleh suku tidung sudah terdapat satu, dua keluarga Suku Bugis, namun pada masa konfrontasi ini menjadi titik paling krusial masuknya Suku Bugis dan berdirinya pemukiman Suku Bugis di Pulau Sebatik.

Pemukiman Suku Bugis pertama di Pulau Sebatik terletak di Sungai Pancang. Saat itu rombongan keluarga Haji Beddurrahim beserta beberapa orang anggota keluarganya yang menumpang di sebuah kapal pinisi dan dua kapal sompe datang ke Pulau Sebatik untuk berkebun. Karena pada saat itu Pulau Sebatik menjadi basis kekuatan Korps Komando Angkatan Laut (KKO) atau sekarang dikenal mariner, Haji Beddurrahim harus meminta izin kepada wilayah setempat dan pemerintah daerah yang berada di Pulau Nunukan. Izin untuk menempati wilayah Pulau Sebatik pun diizinkan dan pemukiman bagi Suku Bugis mulai dibangun di atas Pulau Sebatik (Kartikasari, W. (2012). Mempelajari Wilayah Perbatasan Sebagai Ruang Bersama).

Haji bedurrahim yang sukses membuka lahan di Sungai Pancang kemudian mengundang keluarga dan orang-orang kampungnya untuk membuat pemukiman di Wilayah Sebatik hingga akhirnya wilayah lain di Pulau Sebatik pun berkembang menjadi Pemukiman-pemukiman dengan setiap pemukiman dipimpin oleh seorang pembakal atau kepala kampung. Pembakal yang dipilih ini merupakan orang yang dianggap sebagai perintis dan orang yang paling awal datang ke Wilayah Sebatik.

Kelompok pemukiman yang berkembang saat itu terdapat di Sungai Pancang yang dipimpin oleh Haji Bedurrahim, kemudian disekitar Sungai Nyamuk yang dipimpin oleh Abdullah Gendut. Namun karena Abdullah Gendut sering melakukan pelayaran dan tidak menetap di Sungai Nyamuk peran pemimpin kemudian diserahkan kepada Suratman, seorang keturunan jawa yang menetap di Sungai Nyamuk dan membuka lahan disana. Pemukiman yang lain adalah pemukiman yang berkembang di sekitar Tanjung Aru yang dipimpin oleh Daeng Mappudih. Pemukiman terakhir yang berkembang di Wilayah Pulau Sebatik terdapat di Sungai Taiwan dengan pemimpin bernama Haji Jumnudi. Namun ada versi lain yang berkembang di Masyarakat tentang pembuka pertama di Wilayah Sungai nyamuk adalah Haji Made yang berasal dari Sulawesi. Beliau dipercaya salah satu pedagang yang sering melakukan hubungan dagang dengan toke koboi untuk barter kebutuhan yang berasal dari Tawau.

Pada dasarnya Pulau Sebatik adalah pulau yang memiliki posisi yang sangat strategis. Selain sebagai benteng pertahanan terdepan Indonesia di masa Konfrontasi, Pulau Sebatik juga merupakan pintu dan gerbang terdepan bagi keluar masuknya barang dan jasa. Pulau Sebatik juga merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, Pulau Tarakan, Sulawesi, Tawau hingga jalur perdagangan ke Filipina. Jalur strategis ini kemudian dimanfaatkan oleh para pekerja illegal yang berasal dari NTT, Sulawesi, dan Jawa Timur untuk masuk ke wilayah Sabah Malaysia.

Namun karena kebanyakan pekerja yang menuju Sabah atau Tawau Malaysia ini tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi, akhirnya mereka tidak bisa memasuki Wilayah Tawau. Jika ada yang berhasil bekerja di wilayah Sabah biasanya hanya bekerja sebagai buruh kasar yang dianggap tidak memiliki upah yang sebanding dengan beban pekerjaan yang mereka jalani. Hal ini semakin diperparah dengan Deportasi yang dilakukan pemerintah Malaysia kepada pekerja Illegal yang bermukim di wilayah Malaysia. Para pekerja Illegal ini pun akhirnya terpaksa menetap dan melanjutkan kehidupan mereka di Pulau Sebatik karena tidak memiliki biaya untuk kembali ke daerah asalnya. Hal ini berakibat pada berkembangnya pemukiman-pemukiman baru di Pulau Sebatik yang hidup dengan cara berkebun di areal yang belum dibuka oleh kelompok pemukiman sebelumnya. Wilayah pemukiman di Pulau Sebatik pun semakin berkembang

seiring berkembangnya arus barang, jasa, dan manusia di Pulau Sebatik (Kartikasari, W. (2012). Mempelajari Wilayah Perbatasan Sebagai Ruang Bersama).

C. Kehidupan Sosial, Ekonomi Dan Pendidikan Masyarakat Perbatasan Di Pulau Sebatik

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tatanan masyarakat di Pulau Sebatik telah ada sejak awal abad dua puluh. Sejak terbentuknya Boundary Line dari kesepakatan pemerintahan kolonial Hindia-Belanda dan Britania Raya dalam Traktat 1916 yang memisahkan hak kepemilikan Pulau Sebatik saat ini menjadi milik dua negara, maka secara otomatis garis demarkasi yang disepakati memisahkan masyarakat yang sebelumnya merupakan satu etnis dan hidup berdampingan. Boundary Line ini juga menciptakan masyarakat Frontiers di perbatasan kedua negara.

Menurut D.Whitterley, (Whottersley, 1982 : 101-102) Frontiers adalah daerah perbatasan dalam suatu negara yang mempunyai ruang gerak terbatas. Kedudukan masyarakat Frontiers Pulau Sebatik yang berdekatan dengan Frontier Negara Malaysia mengakibatkan terciptanya hubungan sosial dan ekonomi antara masyarakat di perbatasan kedua negara. Terlebih lagi masyarakat suku Tidung merupakan masyarakat yang pertama kali membangun Pulau Sebatik dan terbiasa beraktivitas di wilayah Malaysia sejak pertama kali mereka memasuki Pulau Sebatik awal abad 20. Masa konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1965

dianggap menjadi masa krusial dimana konfrontasi tersebut berpengaruh besar dalam perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik (Biantoro, S. (2011). Masyarakat Perbatasan di Sebatik Masa Konfrontasi 1963-1066).

1. Sebelum Masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1900-1960

Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat awal Sebatik dengan masyarakat di wilayah Sabah-Tawau Malaysia sejak dulu tidak pernah bisa dipisahkan. Suku Tidung yang menjadi masyarakat pertama yang mendiami Pulau Sebatik terbiasa untuk melakukan hubungan sosial dan ekonomi dengan masyarakat di wilayah Malaysia melalui hubungan dagang. Saat itu masyarakat Tidung sering melakukan aktivitas lintas batas dan untuk melakukan transaksi atau barter hasil kebun yang mereka tanam dengan kebutuhan sehari-hari kepada para pembeli di Tawau. Para pembeli dan penampung hasil perkebunan masyarakat suku Tidung biasanya adalah orang Cina dan orang Bugis yang berada di Tawau.

Wilayah Tawau yang merupakan bagian dari Negara Sabah-Malaysia sendiri sejak lama telah menjadi jalur perdagangan dan pusat ekonomi yang menghubungkan Pulau Sulawesi, Kalimantan Timur, Malaysia, hingga Filipina. Tentu tidak mengherankan jika wilayah Negeri Sabah menjadi titik pertemuan penduduk yang berasal dari berbagai etnis dan bangsa yang berbeda.

Keberagaman penduduk dan etnis di wilayah Sabah juga merupakan dampak dari kebijakan Inggris sejak awal abad 19 yang melakukan rekrutmen terhadap buruh migran dari Jawa dan Cina. Menurut catatan kependudukan pada tahun 1891 tidak kurang terdapat 962 jiwa buruh migran yang berasal dari Jawa di Negara Sabah Malaysia. Jumlah ini semakin berkembang pada masa perekrutan antara tahun 1907 sampai dengan 1931 dengan jumlah buruh migran yang berasal dari Jawa mencapai angka sekitar 10.000 pekerja.

Orang dari Suku Bugis sendiri telah lama melakukan aktivitas perdagangan di wilayah Sabah Malaysia. Wilayah Sabah dan perbatasan di Kalimantan Timur menjadi lokasi strategis bagi para pedagang perantara Suku Bugis untuk mengambil barang dagangan atau pun berdagang. Suku Bugis biasanya mengambil hasil perkebunan di wilayah Kalimantan Timur, kemudian membawa hasil perkebunan tersebut ke wilayah Tawau untuk dijual atau ditukarkan dengan bahan pokok yang akan dijual lagi ke wilayah Kalimantan Timur.

Masyarakat Suku Bugis yang melakukan migrasi ke wilayah Tawau pun terus menunjukkan tren positif. Sejalan dengan perkembangan tersebut kemudian banyak orang Bugis yang aktif melakukan perdagangan menetap di Pulau Sebatik karena memperhitungkan kedekatan wilayah antara Pulau Sebatik dan Tawau yang tentunya lebih memudahkan mereka untuk melakukan aktivitas perdagangan. Pada akhirnya masyarakat Suku Bugis menjadi kelompok mayoritas dan mendominasi

Pulau Sebatik namun tetap menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi secara harmonis dengan masyarakat suku Tidung di Pulau Sebatik.

Aktivitas perdagangan masyarakat di Pulau Sebatik berlangsung setiap hari. Masyarakat di Pulau Sebatik menggunakan perahu dengan cara berdayung selama 12 jam untuk membawa barang dagangan mereka menuju Tawau.

Setelah masa kemerdekaantahun 1945, hubungan perdagangan diantar perbatasan negara ini tetap berlangsung. Hubungan lintas batas ini terus berkembang dari hubungan perdagangan hingga menyangkut hubungan kekerabatan yang terlihat dari fakta-fakta sosial yang memperlihatkan hubungan sosial kultural hubungan kekerabatan hasil dari interaksi dan aktivitas sosial yang selama ini mereka jalankan. Dari pola interaksi yang awalnya hanya berorientasi pada perdagangan, hubungan sosial dan ekonomi masyarakat di Perbatasan berkembang menjadi hubungan kekerabatan karena terjadi perkawinan atau keluarga mereka yang menetap di wilayah negara lain. Hubungan sosial kultural diantar masyarakat di perbatasan kedua negara ini terus bertahan dan berkembang hingga sekarang. Masyarakat di perbatasan Pulau Sebatik tetap menjalin hubungan yang harmonis terhadap masyarakat di negara seberang dan merawat hubungan kekerabatan diantara mereka.

2. Pada Masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1960-1966

Konfrontasi Indonesia dan Malaysia antara tahun 1960-1966 memiliki arti dan makna yang berbeda bagi masyarakat di Pulau Sebatik. Isu tentang konfrontasi Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik hanya beredar melalui mulut ke mulut masyarakat sebatik saat itu, sehingga dimaknai sebagai situasi politik yang kian memanas antara hubungan Indonesia dan Malaysia yang dikarenakan penjajahan Inggris yang berusaha membentuk Federasi Malaysia dibawah bayang-bayang negara Inggris.

Konfrontasi dimaknai lebih lanjut oleh masyarakat Sebatik sebagai konflik dengan pengerahan kekuatan militer hingga terjadi kontak bersenjata untuk menjaga kedaulatan wilayah negara Indonesia. Semangat untuk menjaga kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi dasar semangat masyarakat di Pulau Sebatik untuk membuktikan semangat Nasionalisme sebagai warga Negara Indonesia.

Namun selama masa konfrontasi pemahaman masyarakat Sebatik dengan pemaknaan konfrontasi masih bias dikarenakan hubungan sosial kultural yang selama ini merkea bangun dengan masyarakat yang berada di wilayah Malaysia. Penyebab biasanya makna konfrontasi yang dipahami oleh masyarakat Sebatik saat itu adalah yang pertama, karena etnis yang menduduki wilayah Sebatik Indonesia adalah suku Tidung. Suku Tidung ini adalah masyarakat awal yang membuka Pulau

Sebatik, baik wilayah Sebatik Indonesia atau pun Sebatik Malaysia. Hingga masa konfrontasi berlangsung suku tidung masih mendiami kedua wilayah bahkan hingga ke wilayah Tawau karena yang turut bermukim pertama kali di Pulau Tawau juga merupakan Suku Tidung. Masyarakat saat itu sebenarnya tidak menginginkan konfrontasi antara kedua Negara terjadi karena hubungan sosial kultural masyarakat di Perbatasan.

Faktor sosial kultural tersebut mengakibatkan pemahaman terhadap konfrontasi yang mereka pahami adalah mengusir Inggris dari Pulau Kalimantan. Sehingga tentara Inggris dianggap sebagai musuh yang akan mereka hadapi, bukan tentara Malaysia karena keberadaan tentara Inggris di Pulau Kalimantan dapat mengganggu kedaulatan Negara Indonesia. Masyarakat sebatik saat itu memahami jika tidak terjadi konfrontasi maka inggris masih menguasai Malaysia, dan jika tidak ada Inggris maka pasukan Indonesia dan Malaysia tidak akan pernah berkonfrontasi.

Faktor Kedua yang membuat bias makna masyarakat Sebatik saat itu terhadap pemaknaan konfrontasi adalah hubungan ekonomi yang terjalin antara Masyarakat di Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, dan Pulau Tawau. Tawau yang merupakan bagian dari negara sabah merupakan salah satu penyedia bahan kebutuhan pokok utama bagi masyarakat di Pulau Sebatik. Jika terjadi konfrontasi antara kedua negara, tentu akan menempatkan masyarakat di Pulau Sebatik dalam posisi yang sangat sulit dan mengganggu hubungan perdagangan lintas batas masyarakat Pulau Sebatik.

Pada masa konfrontasi ini masyarakat Pulau Sebatik dihadapkan pada posisi yang amat sulit. Di satu sisi mereka dihadapkan pada kepentingan nasionalisme untuk mengukuhkan identitas mereka sebagai warga Negara Indonesia yang menjaga kedaulatan Negara Indonesia. Namun disisi yang lain mereka dihadapkan pada realitas ekonomi masyarakat di perbatasan yang sangat bergantung kepada wilayah Sabah-Tawau Malaysia untuk memnuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Jiwa nasionalisme dan kecintaan masyarakat di Pulau Sebatik akhirnya tidak terukur dengan realitas ekonomi dan mutlak menempatkan diri mereka sebagai warga Indonesia yang bertugas untuk menjaga kedaulatan Negara Indonesia di Pulau Sebatik.

Walaupun saat itu akses ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pokok di Tawau diputus karena terjadi konfrontasi, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di Pulau Sebatik masih bisa dipenuhi dengan akses pemenuhan kebutuhan pokok yang berasal dari Pulau Nunukan.

Saat kedatangan pasukan Korps Komando Angkatan Laut (KKO-AL) pada tahun 1963 dan kedatangan pasukan sebanyak satu brigade pendarat pada bulan Desember 1964 disambut dengan baik oleh masyarakat Pulau Sebatik. Masyarakat saat itu paham dengan kondisi yang sedang terjadi di Pulau Sebatik terutama kondisi hubungan Indonesia dan Malaysia.

Batalyon 3 yang berjumlah 4.000 personil dibawah pimpinan Mayor R.A.S Sunarto dengan dukungan satu pelton tank dan satu pleton panser amfibi ini terbagi kedalam beberapa kompi. Kompi-kompi ini tersebar ke tida desa yaitu, Setabu, Liang Bunyu, dan Bambang dengan kompi markas berada di Desa Setabu.

Rekrutmen sukarelawan di Pulau Nunukan saat itu disambut antusias oleh masyarakat Pulau Sebatik dengan berbondong-bongdong mendaftar menjadi Pasukan Sukarelawan yang membantu Prajurit KKO-AL dalam menjalankan tugasnya. Walaupun dalam kehidupan di masa konfrontasi yang sulit, dikarenakan keterbatasan kebutuhan pokok dan ribuan tentara yang tiba-tiba memenuhi Pulau Sebatik, kehidupan masyarakat tetap berjalan harmonis. Masyarakat Pulau Sebatik mampu hidup berdampingan dengan tentara. Hubungan yang baik pun diperlihatkan oleh tentara dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Bahkan tentara dan masyarakat saat itu saling memenuhi kebutuhan pokok melalui aktivitas barter dan tentara juga mengabdikan ilmu mereka dengan membuka sekolah rayat (setingkat SD) di Pulau Sebatik karena tidak adanya fasilitas pendidikan saat itu.

3. Setelah Masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1966-Sekarang

Pasca masa konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1966, pasukan KKO-AL mulai ditarik dan kembali ke satuannya masing-masing. Keadaan perekonomian masyarakat di Pulau Sebatik saat itu masih dalam kondisi yang sulit. Banyak

masyarakat yang menyayangkan terutama bekas Sukarelawan yang turut berjuang pada masa konfrontasi atas tidak adanya tindakan dan perhatian pemerintah terhadap masa depan para sukarelawan pasca konfrontasi berakhir. Para sukarelawan dan masyarakat pun kembali menjalankan aktivitasnya seperti biasa dengan berkebutuhan untuk melanjutkan hidupnya ditengah kesulitan ekonomi dan kondisi masyarakat di perbatasan yang belum terlalu stabil.

Perputaran ekonomi di Pulau Sebatik kembali menunjukkan tren positif ketika masuk perusahaan kayu di Pulau Sebatik pada tahun 1969. Perusahaan kayu tersebut bernama PT.Sebatik Abadi yang merupakan milik pengusaha keturunan Cina berkewarganegaraan Malaysia. Perusahaan ini berlokasi di Desa Setabu dan mempekerjakan penduduk Pulau Sebatik sebagai tenaga kerjanya. Selain tenaga kerja, perusahaan ini juga menggunakan jasa penduduk Pulau Sebatik sebagai tenaga keamanan. Walaupun ditengah kondisi yang belum stabil pasca konfrontasi Indonesia-Malaysia, perusahaan ini mampu bertahan selama 10 tahun dan berhenti beroperasi pada tahun 1982 dikarenakan areal hutan telah habis. Kehadiran perusahaan ini di Pulau Sebatik cukup membantu perekonomian masyarakat. Gaji yang diterima setiap pegawai sejumlah 4 ringgit setiap harinya dengan nilai tukar Rp.800 rupiah/ringgit.

Berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia juga menjadi moment penting bagi kedatangan Suku Bugis ke Pulau Sebatik. Suku Bugis yang dikenal sebagai pelaut dan pedagang yang kerap lalu lalang Pulau Sebatik dan Tawau

akhirnya menetap dan membentuk pemukiman di Pulau Sebatik pasca konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Sebelum kedatangan Suku Bugis di Pulau Sebatik, pemukiman masyarakat hanya terletak di Kampung Setabu yang didominasi oleh Suku Tidung. Luas Desa Setabu saat itu terbentang sepanjang Bambang hingga Sungai Pancang sekarang. Pemimpin Kampung Setabu saat M. Sidiq kemudian membagi wilayah ini menjadi dua agar memudahkan pengaturan warga dan wilayahnya. Kampung ini pun akhirnya dibagi menjadi dua, yaitu kampung Setabu dan kampung Pancang yang kemudian pemimpin di kampung pancang diberikan kepada Haji Beddurahim.

Haji Beddurahim sendiri merupakan seorang pedagang Suku Bugis yang berasal dari Sulawesi. Beliau sampai ke Sungai Pancang dengan menggunakan Sebuah Kapal Pinisi dan dua kapal sompe lalu mendirikan pemukiman bersama keluarganya atas tawaran yang diberikan Camat Sebatik dan izin dari KKO (marinir saat itu).

Haji Beddurahim pada awalnya merupakan seorang pelaut sekaligus pedagang dari Bone yang sudah lama merantau dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Haji Beddurahim sendiri pernah berlayar dan berdagang hingga ke wilayah Ungus Matatah di dekat kota Sambuaga Filipina. Namun ketika sampai ke Sungai Pancang, beliau bertekad untuk menetap dan membangun wilayah tersebut. Nama Sungai Pancang diabadikan sebagai nama desa karena saat Haji

Beddurahim berjalan menyusuri sungai ini beliau menemukan pancang yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai Patok. Pancang tersebut diduga sebagai patok yang menandakan batas wilayah Indonesia-Malaysia yang sudah ditatam sejak masa pembagian wilayah oleh Inggris dan Belanda.

Namun ada nama lain yang dipercaya masyarakat Pulau Sebatik sebagai salah satu perantau Bugis yang datang membuka Pulau Sebatik. Nama tokoh yang dianggap sebagai pembuka Pulau Sebatik lainnya adalah Haji Made. Haji Made dipercaya pertama kali datang ke Pulau Sebatik pada tahun 1965 dan mendarat di wilayah Sungai Nyamuk. Sama seperti Haji Baiddurahim, beliau merupakan seorang pedagang sekaligus perantau yang berasal dari Bugis.

Keberhasilan Haji Beddurahim dalam membuka wilayah dan mengolah lahan di Sungai Pancang kemudian memancing migrasi masyarakat Bugis untuk turut membentuk pemukiman di Pulau Sebatik. Akhirnya dibagikanlah wilayah dengan masing-masing wilayah dipimpin oleh seorang pemimpin kampung atau disebut Pembakal. Konon pembagian tanah saat itu dilakukan oleh KKO (marinir) dan para pembuka Pulau Sebatik sebanyak 2 hektar untuk setiap orang yang datang dengan maksud mengolah lahan di Pulau Sebatik.

Pembagian pemukiman pertama terletak di wilayah Sungai Pancang dengan Pembakal Haji Beddurahim. Pemukiman yang kedua terletak disekitar Sungai Nyamuk dengan Pembakal Abdullah Gendut. Namun karena beliau merupakan

bedagang yang tidak menetap, maka digantikan oleh Suratman, seorang keturunan Jawa yang menetap dan membentuk pemukiman di wilayah Sungai Nyamuk. Pemukiman yang ketiga terletak di sekitar Tanjung Aru yang dipimpin oleh Daeng Mappudih. Pemukiman yang terakhir terletak di sekitar Sungai Taiwan yang dipimpin oleh Haji Jumnuhi. Areal lain disekitaran kampung Setabu dan Bambang menjadi wilayah pemukiman Suku Tidung yang merupakan masyarakat asli Pulau Sebatik. Sejak saat itu wilayah Sebatik Indonesia berkembang menjadi areal pemukiman Penduduk, sementara wilayah Sebatik Malaysia berkembang menjadi areal perkebunan sawit hingga sekarang.

Perkembangan wilayah Sebatik Malaysia menjadi areal perkebunan sawit mengundang para pekerja Indonesia yang berasal dari beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur datang dan bekerja untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Berbagai etnis pun datang melalui Pulau Sebatik untuk menyebrang ke wilayah Tawau dan Sebatik Malaysia melalui Pulau Sebatik.

Namun karena keamanan di Perbatasan Malaysia semakin diperketat pasca konfrontasi 1965, para pekerja tersebut tidak bisa memasuki wilayah Malaysia khususnya Tawau karena surat izin yang tidak lengkap atau bahkan tidak memiliki surat izin. Sebagian yang sudah terlebih dahulu masuk ke wilayah Tawau tanpa surat izin yang lengkap akhirnya dideportasi kembali ke Pulau Sebatik. Karena tidak memiliki cukup biaya untuk kembali ke wilayah asalnya, masyarakat yang tadi

terlanjur sampai Pulau Sebatik akhirnya memilih untuk menetap dan menjadi bagian Masyarakat di Pulau Sebatik.

Kedatangan masyarakat ke Pulau Sebatik untuk mencari peruntungan dibidang pertanian semakin memarginalkan posisi Suku Tidung yang merupakan masyarakat dan pembuka pertama di Pulau Sebatik. hingga saat ini kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Pulau Sebatik didominasi oleh Suku Bugis. Pemukiman dan populasi suku lainnya seperti Jawad an Flores terus berkembang. Namun Suku Tidung sebagai suku asli dan pembuka Pulau Sebatik semakin sedikit dan sulit ditemukan. Hingga sekarang Bahasa dan corak utama dari masyarakat yang tinggal di Pulau Sebatik bercorak dan bercirikan khas Suku Bugis karena didominasi Pulau Sebatik didominasi oleh para pendatang yang berasal dari Suku Bugis pasca berakhirnya konfrontasi Indonesia – Malaysia tahun 1965.

4. Problem Pendidikan Di Pulau Sebatik

Ironis, itulah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi pendidikan kita di daerah perbatasan. Betapa tidak, ketimpangan kualitas pendidikan di kota dengan di daerah sudah terjadi sedemikian rupa sehingga cerita tentang sekolah rubuh di daerah perbatasan atau cerita tentang guru yang lari ke negara tetangga, bukan sekedar mitos belaka. Selanjutnya, untuk memperoleh pemahaman secara lebih mendalam, permasalahan ini dapat kita tinjau dari sudut pandang hak dan kewajiban warga negara. Melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, sulit untuk membuat

gambaran umum untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya. Jika sekilas kita melihat pada sekolah-sekolah unggulan yang ada di kota, mungkin kita bisa berbangga dengan kondisi pendidikan kita saat ini. Sekolah-sekolah tersebut sudah sangat mapan dalam hal fasilitas dan kualitas. Para murid dan guru dari sekolah-sekolah elit selalu dimanja dengan fasilitas pendidikan yang lengkap dan mutakhir. Segala proses pembelajaran dijalankan dengan nyaman dan mudah sehingga dapat menghasilkan murid yang berkualitas. Namun, ketika kita melihat kondisi pendidikan di daerah perbatasan, keadaan tersebut sungguh berbanding terbalik (Afandi. 2013.*Pendidikan di Daerah Perbatasan : Terdepan Sekaligus Terbelakang*), (Online), (<http://pandifkipuntan.wordpress.com/tag/httpsajidan-staff-fkip-uns-ac-id/>, diakses tanggal 18 November 2014).

Tak banyak yang mengetahui atau peduli dengan nasib pendidikan anak-anak di daerah perbatasan. Banyak anak di perbatasan yang bernasib malang karena tak dapat memperoleh pendidikan yang bermutu. Di beberapa perkampungan atau dusun di perbatasan Kalimantan misalnya, anak-anak harus berjalan kaki 1-2 jam sejauh hingga 6 Km melintasi hutan dan menuruni bukit untuk mendapatkan pendidikan di sekolah setiap hari. Potret umum siswa di perbatasan memang sangat memprihatinkan. Namun, nasib para gurunya pun tak kalah memprihatinkan, terutama para guru honorer. Para guru tersebut banyak yang harus mengajar 2-3 kelas sekaligus. Hal ini karena kekurangan tenaga guru di sekolah pedalaman. Guru dipaksa bekerja ekstra keras bahkan terdapat ‘tuntutan psikologis’ untuk bekerja lebih

besar daripada guru PNS karena status tidak tetap sebagai guru honorer lebih rentan daripada guru berstatus PNS yang meskipun sebulan tak mengajar di sekolah masih akan tetap menerima gaji.

Daerah-daerah perbatasan yang pada hakikatnya merupakan daerah terdepan sebagai pintu gerbang untuk memasuki Indonesia menjadi daerah yang paling terbelakang dalam hal pendidikan dan kesejahteraan guru. Kenyataan tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan konstitusi karena sesuai dengan pasal 34 UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Artinya, baik anak-anak di daerah perkotaan maupun anak-anak di daerah perbatasan mempunyai hak yang sama, yaitu sama-sama mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Tidak dapat dipungkiri bahwa selain memiliki hak, warga negara juga mempunyai kewajiban, salah satu diantaranya adalah kewajiban untuk membela kedaulatan negara. Namun, ketika pemerintah tidak dapat memenuhi hak-hak warga negara, warga negara tersebut juga cenderung untuk mengabaikan kewajibannya. Contohnya adalah yang terjadi masyarakat yang berdomisili di sepanjang perbatasan. Mereka lebih berinteraksi dan berorientasi kepada desa terdekat negara tetangga.

Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme. Inilah dampak buruk yang terjadi apabila pendidikan dan kesejahteraan

masyarakat di daerah perbatasan diabaikan, karena akan mengikis rasa nasionalisme yang bukan tidak mungkin akan mengancam kedaulatan bangsa (Afandi, 2013. *Pendidikan di Daerah Perbatasan : Terdepan Sekaligus Terbelakang*), (Online), (<http://pandifkipuntan.wordpress.com/tag/httpsajidan-staff-fkip-uns-ac-id/>, diakses tanggal 18 November 2014).

Gambar 2.3
keadaan Sekolah Di Perbatasan



Tabel 2.1

Penyebaran SD dan MI di pulau sebatik

No	Lokasi	Jumlah SD (Sekolah Dasar)	Jumlah MI (Madrasah Ibtidaiyah)
1.	Kecamatan sebatik		
	a. Desa Tg. Karang	2	1
	b. Desa Padaidi	-	1
	c. Desa Balansiku	-	1
	d. Desa Sungai Manurung	-	-
2.	Kecamatan Sebatik Utara		
	a. Desa Seberang	-	-
	b. Desa Lapri	1	-
	c. Desa Sei Pancang	-	1
3.	Kecamatan Sebatik Tengah		
	a. Desa Aji Kuning	1	-
	b. Desa Bukit Harapan	2	-
	c. Desa Sungai Limau	2	-
	d. Desa Maspul	1	-
4.	Kecamatan Sebatik Barat		
	a. Desa Setabu	2	-
	b. Desa Liang Bunyu	1	2
	c. Desa Bambang	1	-
	d. Desa Binalawan	1	-

5.	Kecamatan Sebatik Timur		
	a. Desa Sei Nyamuk	1	1
	b. Desa Tg. Harapan	-	1
	c. Desa Tg. Aru	1	-
	d. Desa Bukit Aru Indah	1	2

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Nunukan Tahun 2016

Dari tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa pembangunan di pulau sebatik yang berorientasi menyediakan fasilitas memenuhi kebutuhan dasar berupa fasilitas pendidikan bangunan sekolah dasar yang belum dapat dinikmati masyarakat sebatik secara keseluruhan karena masih ada 2 (dua) desa yang belum memiliki bangunan sekolah dasar yaitu Desa Manurung dan Desa Seberang sehingga anak-anak masih sulit mendapatkan pendidikan dan harus ke desa tetangga untuk menempuh pendidikan dasar. Pada tabel 2.1 juga nampak bahwa sekolah dasar di beberapa desa lainnya bukan sekolah negeri melainkan sekolah swasta yang pembangunan dan pengelolaan bukan dari pemerintah. Begitu juga dengan akses jalan menuju sekolah yang sebagian besar kondisinya masih jalan tanah.

Sebatik merupakan wilayah yang tergolong tertinggal. Berbagai keterbatasan masih terlihat dari keberadaan infrastruktur pada sarana perhubungan, komunikasi, penyediaan air bersih, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan. Sarana pendidikan yang ada saat ini masih terbatas. Beberapa desa hanya mempunyai sekolah sampai SD. Untuk wilayah Sebatik Barat, Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) hanya ada dua

yakni satu di Desa Setabu dan satu di Desa Aji Kuning. Anak-anak penduduk desa harus menempuh jarak cukup jauh bila ingin melanjutkan pendidikan pada tingkat SMP. Saat ini Sekolah Menengah Atas baru ada di Kecamatan Sebatik Timur, itupun sekolah status swasta. SMA status negeri hanya ada di Nunukan. Kondisi seperti ini menyebabkan banyak penduduk yang mengalami kesulitan untuk melanjutkan sekolah. Dua kendala dalam melanjutkan sekolah untuk masyarakat yang tinggal di pulau ini adalah masalah jarak lokasi dan kemampuan terbatas. Hanya beberapa anak, khususnya dari golongan mampu yang dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, kualitas pendidikan penduduk Sebatik sebagian besar relatif rendah (hanya mencapai tingkat Sekolah Dasar) (Basundoro, P. (2013). Pulau Sebatik Sebagai Pintu Kecil).

Pengembangan Pulau Sebatik Indonesia ke depan diupayakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai potensi sumber daya yang ada. Baik dari sisi letak geografisnya sendiri maupun potensi sumber daya alamnya yang telah ada dan melimpah saat ini serta sumber daya manusianya. Untuk meningkatkan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan formal diperlukan sarana pendidikan yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, buku-buku pelajaran dan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga miskin dan anak-anak terlantar (Basundoro, P. (2013). Pulau Sebatik Sebagai Pintu Kecil).

Kecamatan pulau sebatik tengah sendiri merupakan satu wilayah Negara yang berbatasan langsung dengan Negara lain yaitu Malaysia. Pendidikan di pulau sebatik masih di bilang kurang memadai karena dari segi pelayanan pendidikan masih kurang sumber daya manusia pengajar, bangunan, transportasi ketersediaan buku dan lai-lain. Tenaga pengajar terkadang kehadiran dari Indonesia mengajar yang berjumlah 2 orang untuk tenaga pendidik di SD setempat dan juga ada lembaga swasda masyarakat (LSM) yang di bentuk oleh tenaga pengajar yaitu Indonesia mengajar atau seribu guru yang datang ke perbatasan supaya masyarakat punya peran aktif terhadap pendidikan di perbatasan dari mulai gotong royong, membangun sekolah kegiatan belajar dan sebagainya. Supaya masyaarakat yang ada di pulau sebatik mempunyai wadah sosial sesama masyarakat di sebatik tengah.